

Begini Persiapan Polisi Amankan Arus Mudik di Banten

SERANG (IM) - Kepolisian Daerah (Polda) Banten melakukan sejumlah persiapan, untuk mengamankan arus mudik Lebaran 2023. Puncak mudik diprediksi akan terjadi mulai H-4 sampai dengan H-1 Lebaran. Sedangkan arus balik mulai H+3 sampai dengan H+6 Lebaran.

Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Firman Darmansyah menuturkan, cuaca buruk dan bencana alam serta lonjakan pergerakan orang pada saat mudik serta wisatawan, harus diantisipasi dalam menyambut Operasi Ketupat 2023.

"Agar diantisipasi cuaca buruk serta meningkatnya pelanggaran lalu lintas pada saat mudik," kata Firman dalam rapat koordinasi awal lintas sektoral dalam rangka kesiapan Operasi Ketupat 2023 di ruang rapat Birorena Polda Banten, Jumat (3/3). Sebagai langkah persi-

apan, polisi meminta semua pihak yang terlibat untuk menyiapkan pos pengamanan dan pelayanan di sejumlah titik strategis.

"Untuk itu agar para stakeholder terkait dapat berkoordinasi, untuk menyiapkan sarana prasarana pospadam dan pos pelayanan yang baik pada jalur tol dan arteri," ujarnya.

Selain itu, firman juga menyoreti kendaraan yang mogok akibat kehabisan BBM saat kemacetan arus mudik.

"Siapkan langkah pelayanan persediaan BBM apabila terjadi crowded atau kemacetan," ucap Firman.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Karo Ops Polda Banten, Kombes Pol Dedi Suhartono, Kadishub Provinsi Banten, Kepala BPTD Wil VIII Banten, GM PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelindo serta instansi terkait. ● **pra**

KEMACETAN LALU LINTAS MAKIN PARAH

Gibran Bakal Ubah Sistem Jalan Satu Arah di Solo

SOLO (IM) - Imbas kemacetan makin parah di Kota Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengatakan bakal melakukan rekayasa lalu lintas.

Sebelumnya keluhan kemacetan di Kota Solo, mulai dirasakan pekan ini. Kemacetan parah pada waktu berangkat sekolah. Kemacetan tersebut juga diperparah dengan adanya sejumlah jalan yang ditutup akibat pembangunan dan kondisi cuaca hujan di Kota Bengawan.

Sejumlah ruas yang mengalami kemacetan, seperti di Jalan Monginsidi, Jalan MT Haryono, Jalan Moewardi, Jalan Panjaitan, Jalan Letjen S. Parman, Jalan Hasanudin, Jalan RM Said, Jalan Popda, Jalan Piere Tendean, Jalan Raya Solo, Jalan Letjen Sutoyo, dan Jalan Tentara Pelajar. Bukan hanya di jalan raya saja yang mengalami kemacetan, bahkan jalan-jalan kampung di Kota Solo saat ini juga

terpantau adanya kepadatan dan juga terjadi kemacetan karena jalan tersendat parkir mobil liar di sepanjang jalan.

"Kita evaluasi lagi ya. Memang di beberapa ruas jalan ini masih traffic-nya masih ramai dan stuck, karena ada perbaikan jalan di Viaduk dan elevated railway," jelas Gibran Rakabuming Raka di Masjid Raya Sheikh Zayed, Jumat (3/3).

Untuk mengurangi keluhan kemacetan di sejumlah wilayah itu, suami Selvi Ananda mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dan simulasi rekayasa lalu lintas penguraian kemacetan. "Kemarin sudah kita simulasi, untuk beberapa ruas jalan yang sebelumnya satu arah akan jadi dua arah," jelasnya. "(Jalan satu arah) Slamet Riyadi tidak diubah dua arah. Yang diubah, misalnya, Jalan Prof Suharso, kemungkinan akan menjadi dua arah," lanjutnya. ● **pra**



IDN/ANTARA

DONGENG EDUKASI HARI SATWA LIAR SEDUNIA
Pendongeng keliling, Samsudin (kiri) bersama Pemusik tradisi Kang Wata (kanan) memberikan cerita dongeng tentang kehidupan satwa liar Indonesia di Taman Cimanuk, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (3/3). Dongeng edukasi tentang satwa yang melibatkan anak-anak itu dalam rangka memperingati hari Satwa Liar Sedunia.

Investor Jepang Tertarik Pembangunan Halal Food Center Kota Bogor

BOGOR (IM) - Wali Kota Bogor, Bima Arya melakukan pertemuan dengan para calon investor. Dia menawarkan program pembangunan Halal Food Center yang membutuhkan investasi senilai USD 16,8 juta atau sekitar Rp 257,3 miliar.

"Kami bertemu dua potensial investor dari Jepang, yaitu Kajima Corporation dan Mitsubishi Logistic. Salah satu program yang sedang kami akselerasikan adalah pembangunan Halal Food Center di wilayah Rancamaya, di atas lahan milik Pemkot Bogor seluas 9 hektar. Ini kami bermitra dengan IPB. Dibutuhkan dana yang tidak sedikit angkanya sekitar USD 16,8 juta," ungkap Bima Arya dalam keterangan tertulis pada Jumat (3/3).

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Director Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo, Muhammad Riffana itu, Bima menjelaskan konsep Halal Food Center yang di dalamnya akan diisi oleh sentra UMKM hingga tempat wisata.

"Saya jelaskan bagaimana

Halal Food Center ini. Di dalamnya ada tempat pemotongan hewan, ada sentra UMKM, distribusi logistik dan juga tempat wisata. Kami proyeksikan bukan hanya tempat pembangunan UMKM tapi juga menjadi destinasi dari turis yang berkunjung ke Kota Bogor," jelas Bima.

Bima mengaku terkejut ketika calon investor yang ditemuinya itu sudah mempelajari data-data seputar Kota Bogor sebelumnya, termasuk mengapresiasi pertumbuhan ekonominya Kota Bogor pasca pandemi Covid-19.

"Mereka ternyata sudah punya data-data. Saya cukup surprise juga, mereka tahu pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor di atas rata-rata Jawa Barat dan Nasional. Prospek ekonomi di Bogor sangat luar biasa, apalagi market-nya sangat besar," tutur politisi PAN ini.

"Saya jelaskan, Kota Bogor tidak saja menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat tapi juga bagian dari megapolitan terbesar di dunia, yaitu Jabodetabek," tambah Bima. ● **gio**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



AKSI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI BANDUNG

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Koalisi Sipil Bandung Peduli Agraria, Lingkungan, dan Iklim melakukan aksi di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/3). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan pembangunan di Kawasan Bandung Utara serta menghentikan rencana pembuatan tol Ciwidey - Pangalengan - Soreang karena wilayah tersebut adalah kawasan cagar alam yang rentan menimbulkan bencana alam.

Pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 Segera Tuntaskan Pembebasan Lahan

Dari 19,13 persen lahan yang belum dibebaskan untuk pembangunan jalan Tol Bocimi Seksi 3 ini, sebagian besar berkasnya sudah diajukan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pihak ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi optimistis pembebasan tanah on track dan mudah-mudahan sebelum Desember 2023 ini, rampung semua.

SUKABUMI (IM) - Upaya pembangunan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabu-

mi (Bocimi) seksi 3 terus dilakukan. Di mana saat ini proses

pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Bocimi seksi 3 sudah mencapai sekitar 80 persen.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kabupaten Sukabumi, Sugama Putra mengatakan, sampai saat ini progres pembebasan luas lahan untuk pembangunan jalan tol seksi 3 yang telah dilaksanakan Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) sudah mencapai 80,69 persen.

Lahan itu terdiri dari

tanah masyarakat perorangan dan badan hukum swasta.

"Ada juga tanah-tanah berkarakteristik khusus, seperti tanah instansi, tanah wakaf dan tanah kas desa yang tengah diproses," kata Sugama, kemarin.

Namun untuk tanah masyarakat dan badan hukum swasta yang sudah dibebaskan itu ada di angka 80,69 persen dan sisanya 19,31 persen lagi.

Dari 19,13 persen lahan yang belum dibebaskan untuk pembangunan jalan Tol Bocimi Seksi 3 ini terang Sugama, sebagian besar berkasnya sudah diajukan kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Pihaknya optimis pembebasan tanah on track dan mudah-mudahan sebelum Desember 2023 ini, bisa rampung semua.

Ketika LMAN menyetujui berkas yang diajukan pembayaran artinya lolos verifikasi dan kemudian ditindaklanjuti pembayaran UGK (uang ganti kerugian-red) dan dari sisi P2T menunggu dari LMAN.

Di mana, kalau LMAN sudah mengeluarkan persetujuan pembayaran maka kegiatan pembayaran UGK segera dilakukan.

Terkait lahan sengketa kepemilikan lanjut Sugama,

ada yang difasilitasi dengan upaya mediasi.

Untuk menyukseskan pembebasan lahan yang rencananya akan dibangun Jalan Tol Bocimi ini, BPN Kabupaten Sukabumi terus berupaya maksimal dalam memfasilitasi masyarakat.

Hal ini kata Sugama, memang perlu dilakukan karena ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan agar pembebasan lahan tersebut bisa dilakukan dengan baik seperti persoalan sengketa kepemilikan.

"Kami memfasilitasi upaya penyelesaian masalah kepemilikan tanah dengan memediasi masyarakat yang bersangkutan. Alhamdulillah, hasil mediasi itu bisa tercapai kesepakatan win win solution dan semuanya sudah sepakat," kata Sugama.

Untuk pembayaran uang ganti kerugian kepada masyarakat yang memiliki lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan Tol Bocimi ini, terang Sugama, tidak dibayarkan langsung oleh BPN Kabupaten Sukabumi.

Ketika sudah melakukan pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah maka LMAN akan mentransfer uang langsung ke rekening masing-masing masyarakat penerima uang ganti kerugian. ● **pra**

Sekda Burhanudin: Jangan Ada Ego Sektoral dalam Menyusun Program Kegiatan



Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin ajak jajaran jangan ego sektoral

BOGOR (IM) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengingatkan seluruh jajarannya untuk mengesampingkan ego sektoral dalam menyusun program kegiatan.

Seluruh perangkat daerah harus meningkatkan sinkronisasi, kolaborasi, dan integrasi program kegiatan. Hal ini ditegaskannya saat mewakili Plt. Bupati Bogor pada Forum Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, di Kantor DPKPP, Cibinong, Kamis (2/3).

Burhanudin menegaskan, perintah ini bukan hanya untuk DPKPP saja tapi berlaku bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Semuanya harus meningkatkan sinkronisasi, kolaborasi dan integrasi berbagai program kegiatan. Terutama program kegiatan yang masih terkesan ada ego sektoral, hal ini harus kita kesampingkan. Kita harus terus semangat menjadi super tim, karena dalam bekerja itu tidak ada yang namanya superman.

"Mudah-mudahan Kabupaten Bogor kedepan

akan lebih maju dan lebih baik sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat," tandas Burhanudin.

Untuk diketahui, forum perangkat daerah merupakan ajang bagi perangkat daerah untuk menginformasikan rencana program kegiatan tahun 2024 kepada para pemangku kepentingan.

Sekaligus menyelaraskan program kegiatan perangkat daerah dengan usulan prioritas hasil musrenbang tingkat kecamatan, perangkat daerah lain dan pokok-pokok pikiran DPRD. Serta mempertajam indikator kinerja dan target program kegiatan perangkat daerah.

Burhanudin menyebutkan, tahun 2024 merupakan awal perencanaan jangka menengah pasca berakhirnya RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023.

Untuk itu diharapkan perangkat daerah dapat menginventarisir kembali program kegiatan yang belum terlaksana atau belum mencapai target untuk dilanjutkan pada tahun 2024. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan pembangunan.

"Saya minta perenca-

naan agar matang, efektif, efisien, berdasarkan prioritas, serta mengacu pada kebijakan nasional dan Jawa Barat tahun 2024 agar strategi pembangunan pusat dan daerah," kata Burhanudin.

Ia meminta agar pempeodomani seluruh aturan yang telah ditetapkan, ikuti tahapan dan alur perencanaan dengan baik dan pastikan bahwa seluruh kinerja perangkat daerah yang dirumuskan untuk tahun 2024 terinput di dalam SIPD secara tepat, untuk memudahkan penelusuran proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

"Saya harap forum perangkat daerah ini dapat menghasilkan rumusan program kerja tahun 2024 yang tepat tujuan dan sasaran, demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bogor," ujar Sekda Burhanudin.

Hadir mendampingi Sekda pada Forum Perangkat Daerah DPKPP, Staf Ahli Bidang Pemerintahan. Sebagai narasumber, Kasubdit Wilayah II Direktorat Rumah Khusus, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ● **gio**

Perihal Tuntutan Gempar Menyangkut Ade Yasin

CIBINONG (IM) - Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor, Adriawan menjelaskan perihal Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (Gempar) menyangkut Ade Yasin.

Menurutnya, temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2022 lalu merupakan hasil audit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2021.

Adriawan berkilah, pada saat titik pemeriksaan tersebut dia belum menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor.

Dia mengaku masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Titik pemeriksaan BPK itu ketika Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor dijabat pejabat sebelumnya, saya menggantikan pejabat tersebut jelang akhir tahun atau setelah proyek-proyek yang disebut pen-demo selesai dilelang," ucap Adriawan kepada wartawan, Jumat (3/3).

Terkait tuntutan pencopatan Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor dan Pokja, itu sudah dilakukan di zaman Bupati Bogor non-aktif Ade Yasin.

"Kalau yang didemo itu kan pejabat sebelumnya, baik Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor dan Ketua Pokja Khusus itu sudah dirotasi ke bagian atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain," tuturnya.

Sebelumnya, Gempar mendesak Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mencopot Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor dan kelompok kerja (Pokja) yang bermasalah.

"Hari ini, Gempar mendesak Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mencopot Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor dan Pokja yang bermasalah," kata Koordinator Aksi Gempar Putra Nur Pratama.

Dia menjelaskan, Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin yang tertangkap KPK adalah korban dari Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor dan Pokja yang bermasalah hingga mereka harus dicopot dari jabatannya. ● **gio**